

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard Raho, 2012, *Teori Sosiologi Modern*, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Izza Mafruhah, 2017, *Migrasi dan Permasalahan : Sebuah Overview Kondisi di Indonesia*, Djiwa Amarta Press, Surakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nurhidayati, 2022, *Monograf Imigrasi Dan Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Nuta Media, Yogyakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Hak-hak pekerja migran : buku pedoman untuk serikat pekerja Indonesia*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.
- Rizka Zulfikar, Fifian Permata Sari, Anggi Fatmayati, Kartika Wandini, Tati Haryati, Sri Jumini, Nurjanah, dan Hafid Fadilah Selvi Annisa, Oktavy Budi Kusumawardhani, Rif'atul Mutiah, Alexander Indrakusuma Linggi, 2024, *Teori, Metode dan Praktik Penelitian Kualitatif*, Widina Media Utama, Bandung.
- Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo.
- Sihar Sihombing, 2013, *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Tim Politeknik Imigrasi, 2021, *Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan*, Dewangga Energi Internasional, Bekasi.
- Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum*, Unimal Press, Lhokseumawe.

B. Jurnal dan Internet

- Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahmaningtias, 2023, Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 23, No. 2, 1474–1484.
- Atina Nuzulia, 2021, Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan PMI Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, *Jurnal Abdimas Imigrasi* No. 1, 21–28.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2019, BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, diambil dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>. (Diakses pada tanggal 30 November 2024).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Statistik Layanan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia, diambil dari <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2025).
- Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022–2024, diambil dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>. (Diakses pada tanggal 19 November 2024).
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2022, *Cegah PMI Non Prosedural, Edukasi Harus Masif dan Semua Jalur Harus Diperketat*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, diambil dari <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/cegah-pmi-non-prosedural-edukasi-harus-masif-dan-semua-jalur-harus-diperketat/>. (Diakses pada tanggal 2 Desember 2024).
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Calon Pekerja Migran Indonesia, <https://www.imigrasi.go.id/wni/paspor-baru/calon-pekerja-migran-indonesia>. (Diakses tanggal 26 Juni 2025).
- Era Astri Ifo, 2023, Peran Perancang Peraturan Perundang -Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, *Al-Sulthaniyah*, Vol. 11, No. 1, 28–39.
- Erwin Syahputra, Dessy Indah Sari, Ica Zuniar Sari, Haris Fadila, M Robi Azhari, Johan Sitorus, Anugerah Jaya Halawa, *et al*, 2022, Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Formal (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan), *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 2, 274–284.

- Felix Ferdin Bakker, dan Tony Mirwanto, 2021, Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan, Vol. 3, No. 1, 51–63.
- Humas Imigrasi Ponorogo, 2024, *Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal Desa Binaan*, Imigrasi Ponorogo. Ponorogo, diambil dari <https://ponorogo.imigrasi.go.id/cegah-calon-pmi-jadi-korban-perdagangan-orang-146-personel-imigrasi-kawal-desabinaan/>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2024).
- Kemenkum Kalbar, 2024, Tingkatkan Pelayanan Imigrasi Melalui Desa Binaan, [Https : //kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-pelayanan-keimigrasian-melalui-desa-binaan](https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-pelayanan-keimigrasian-melalui-desa-binaan). (Diakses tanggal 20 Juni 2025).
- Lustina Fajar Prastiwi, 2016, Analisis Pekerja Migran dan Nonmigran Perkotaan Pada Sektor Formal dan Sektor Informal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 4, No. 1, 1–22.
- Malahayati dan Muhammad Fadhli, 2013, Perlindungan Hukum dalam Memorandum of Understanding tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia, *Nanggroe: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, No. 2, 16–42.
- Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir, 2015, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Nanggroe Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 1–27.
- Moh Isa Ashari, dan Ahmad Kafrawi Mahmud, 2018, Apakah yang Memengaruhi Fenomena Migrasi Masuk ke Wilayah Perkotaan?, *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* Vol. 5, No. 1, 61–79.
- Moh. Romli dan Devi Rahayu, 2024, Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, *Simbur Cahaya*, Vol. 31, No. 1, hlm. 172-187.
- Mohd. Feri Andrian, Muhammad Nasir, dan Yusrizal, 2021, Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh* Vol. 9, No. 2, 25–49.
- Muhammad Azzam Alfarizi, Ridha Nikmatus Syahada, dan Lisa Arianti Kusuma Dewi, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, 507–523.
- Muhammad Junaidi, dan Khikmah Khikmah, 2024, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 1, 490–501.

- Rahma Iria Mayang Anggraeni, dan Anita Herlina, 2019, Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, No. 2, 117–126.
- R H S Siregar, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 2, No. 20, 666-677.
- Rizki Zakariya, 2022, Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 236–259.
- Rizky Dewi Ayu, 2023, *Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, dan Upaya Pelindungannya*, Tempo, jakarta, diambil dari <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya-103584>. (Diakses pada tanggal 18 November 2024).
- Werdy Satrio Bayuaji, dan Puspitasari, 2024, Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 10, 4011–4023.
- Zaki Mubarak, 2024, *Rawan Sindikat TPPO, Imigrasi Lhokseumawe Bentuk Desa Binaan Imigrasi*, Serambinews.com. Aceh Utara, diambil dari <https://aceh.tribunnews.com/2024/06/05/rawan-sindikat-tpo-imigrasi-lhokseumawe-bentuk-desa-binaan-imigrasi>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2024)
- Zulfan Fikriansyah, dan Aan Julia, 2023, Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu), *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 25–32.

C. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif.

Direktorat Jenderal Imigrasi, 26 Juli 2023, Surat Edaran Nomor: IMI.4-GR.04.01-691 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi.